

KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA DALAM MERESPON DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS DI ASIA TENGGARA

Shandika Yoga Erlangga¹

1. Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to analyze the response of Indonesia in an effort to counterbalance the development of military power in Southeast Asia during the 1998-2010 periods. This response is placed on the dimensions of the development policy of Indonesia's defense posture. The author uses a case study design. Through analysis of various documents, books, journals, and other sources as well as interviews with six experts in the field of defense, the author argues that Indonesia's defense posture development policy (land, sea, and air) in response to the military development in the countries of the Southeast Asia region during 1998-2010 period is intended to achieve more deterrent power than building an offensive force. The policy was made in light of the perception that the countries in Southeast Asia have the potential to threaten the security and sovereignty of Indonesia. Meanwhile, Indonesia's ability to build up military strength in the upper levels is very limited deterrent. Limited sources of funding and political support as well as weaknesses in analyzing the strategic environment of the region led to the development of the policy could not achieve the level of deterrent and also have not gotten to the point 'strategic stability'. Indonesia was plagued by the problems of arms embargo by foreign countries and still has problems in the institutionalization of research and development. This thesis also gives some recommendations on efforts to develop Indonesia's future defense posture, particularly in the context of the security dilemma in Southeast Asia.

Keywords: action-reaction spiral, Indonesia's defense posture, deterrence, strategic stability.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis respon Indonesia dalam upaya mengimbangi pembangunan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara selama periode 1998-2010. Respon tersebut ditempatkan pada dimensi kebijakan pengembangan postur pertahanan Indonesia. Penulis menggunakan desain studi kasus. Melalui analisis terhadap pelbagai dokumen, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain serta wawancara terhadap enam orang pakar di bidang pertahanan, penulis berargumen bahwa kebijakan pembangunan postur pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam merespon pembangunan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 1998-2010 lebih dimaksudkan untuk mencapai kekuatan deterrent daripada membangun kekuatan ofensif. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat adanya persepsi bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sementara, kemampuan Indonesia untuk membangun kekuatan militer di atas tingkat deterrent sangat terbatas. Keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam menganalisis perkembangan lingkungan strategis kawasan menyebabkan kebijakan tersebut tidak mencapai tingkat deterrent dan juga belum sampai pada titik 'strategic stability'. Indonesia sempat terkendala oleh persoalan embargo persenjataan oleh negara-negara asing dan masih memiliki persoalan dalam pelembagaan riset dan pengembangan. Tesis ini juga memberi beberapa rekomendasi terhadap upaya pengembangan postur pertahanan Indonesia masa depan, terutama dalam konteks dilema keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: spiral aksi-reaksi, postur pertahanan Indonesia, deterrence, strategic stability.

PENDAHULUAN

Francis Fukuyama, di dalam karyanya yang berjudul *The End of History and The Last Man*, menyatakan bahwa dengan berakhirnya kompetisi besar (Perang Dingin) antara dua kekuatan internasional, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet, kehidupan masyarakat dunia akan jauh lebih damai karena peningkatan kerjasama antarnegara-bangsa akan dibarengi dengan terwujudnya kesejahteraan sosial, termasuk stabilitas ekonomi dan politik. Selain itu, perang antarnegara-bangsa, terutama antarnegara demokratis, akan berakhir mengingat persaingan ideologi yang menjadi penyebab perang telah usai. Inti dari pandangan Fukuyama ialah bahwa dengan menangnya ideologi demokrasi liberal, tidak ada ideologi alternatif lain setelah itu. Hal ini menjadi pertanda bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan “*the end point of mankind’s ideological evolution*” sekaligus sebagai “*final form of human government*”, sehingga Fukuyama menyebut kondisi yang demikian itu sebagai “*the end of history*”(Fukuyama, 1989).

Akan tetapi, periode awal 1990-an, yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin antara dua kekuatan adidaya itu, justru memberikan tantangan baru bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan berakhirnya perang dingin, maka negara-negara di kawasan ini, yang tergabung di dalam the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) (ASEAN, 2011), akan dihadapkan kepada apa yang disebut sebagai *the new post-Cold War era*. Hal ini diamati oleh Alan Collins, seorang pengajar ilmu politik pada University of Wales. Pengamatan Collins tersebut kemudian dibukukan ke dalam sebuah karya berjudul *The Security Dilemmas of Southeast Asia* (Collins,2000). Karya ini cukup komprehensif dalam menelaah dinamika kekuatan persenjataan serta dilema keamanan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Collins mengemukakan serangkaian indikator yang menunjukkan betapa kawasan Asia Tenggara, pada awal era 1990-an itu, masuk ke dalam “*a period of uncertainty at best and rising tension at worst*”, yakni pengadaan senjata oleh negara-negara anggota ASEAN, mencairnya pertentangan di dalam teritorial/wilayah usai Perang Dingin, kemunculan Cina sebagai sebuah hegemoni kawasan, dan hampir meratanya ketegangan etnik di seluruh wilayah (Collins,2000).

Dengan menelaah data dari *The Military Balance 1997/98*, Collins menjelaskan bahwa ketika Perang Dingin usai pada awal 1990-an dan sebelum krisis ekonomi terjadi di tahun 1997, terlihat adanya peningkatan yang nyata dari rata-rata besaran anggaran belanja persenjataan di Asia Tenggara (Collins,2000). Negara-negara yang meningkatkan anggaran belanja persenjataan mereka, sebagaimana dikaji oleh Collins, antara lain Indonesia (\$1,402 juta), Malaysia (\$1,133 juta), Filipina (\$810 juta), Singapura (\$2,337 juta), dan Thailand (\$1,653 juta). Sementara itu, Burma, yang menjadi anggota baru ASEAN, juga meningkatkan anggaran belanja persenjataannya pada masa itu, yakni sebesar \$729 juta. Collins menambahkan bahwa terjadi peningkatan dalam pengiriman senjata ke Asia Timur dari semua transfer senjata di dunia, yaitu dari sebesar 11,9% pada

tahun 1987 menjadi 23% pada tahun 1996. Terkait itu, hanya kawasan Timur Tengah yang pada tahun 1996 memperoleh lebih banyak pasokan senjata. Dalam hal pengeluaran sebesar \$700 juta pada tahun 1996, dua negara, yakni Thailand dan Indonesia, merupakan negara pembeli senjata terbesar di Asia Tenggara (Indonesia naik sebesar \$530 juta dari tahun sebelumnya).

Namun demikian, lanjut Collins, kedua negara tersebut mendapatkan pukulan keras tatkala badai krisis ekonomi menerpa Asia Tenggara. Menyikapi hal tersebut, Indonesia menunda pengadaan persenjataannya hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Lain halnya dengan Thailand, yang justru memilih untuk memesan Jet Hornet F/A-18 dari AS.7 Selanjutnya, pada catatan kaki di dalam penjelasannya terkait krisis ekonomi yang memukul kedua negara di Asia Tenggara tersebut, dengan mengacu pada pemberitaan *The Sydney Morning Herald* 12 Maret 1998, Collins juga memberikan penjelasan tambahan bahwa Thailand mengurangi pesanan delapan F/A-18 pada Maret 1998 dan Indonesia mengambil langkah untuk menunda pemesanan dua belas SU-30 dan delapan helikopter Mi-17 dari Rusia pada Januari 1998.

Krisis ekonomi yang mengguncang Asia Tenggara juga dirasakan oleh sejumlah negara lain di kawasan ini. Malaysia menanggukahkan modernisasi persenjataan negaranya hingga tahun 2000, tetapi telah menyatakan niatnya untuk membeli dua frigate (kapal pengawal), juga kapal selam dan helikopter serang. Berbarengan dengan Malaysia, Singapura, yang tidak memiliki rencana untuk membatasi pemesanan sebanyak tiga puluh pesawat, bahkan mengambil kiriman lanjutan F-16 Fighters dari AS. Anggaran pertahanan Singapura pada Februari 1998 memang mengalami kenaikan dari 4,4% menjadi 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Filipina, kendatipun sangat tergantung kepada kemajuan perekonomian, juga telah mengumumkan alokasi sebesar \$13 milyar untuk program modernisasi persenjataannya, termasuk untuk pembelian sebanyak dua puluh empat pesawat tempur multi role-fighter aircraft serta tujuh kapal patroli.

Dari serangkaian data di atas, yang memperlihatkan peningkatan anggaran belanja untuk persenjataan di kawasan Asia Tenggara pasca- berakhirnya Perang Dingin, dapat dimaknai bahwa sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara masih dan terus berupaya memperkuat postur pertahanan (kekuatan dan kemampuan) militernya. Kondisi ini dapat dipahami mengingat di kawasan Asia Tenggara juga tersimpan sejumlah sengketa tapal batas wilayah/teritorial antar-negara, sebagaimana diperlihatkan oleh **Tabel 1 berikut**.

Tabel 1 Pelbagai Klaim Teritorial Antarnegara Anggota ASEAN

- Klaim Filipina atas Sabah (Malaysia).
- Persaingan dalam klaim pulau-pulau dan terumbu di Spratlys yang melibatkan Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
- Batas sengketa antara Indonesia dan Vietnam pada garis demarkasi di landas kontinen dekat Pulau Natuna.
- Sengketa perbatasan antara Vietnam dan Kamboja.
- Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Vietnam pada garis demarkasi lepas pantai antara keduanya.
- Sengketa antara Malaysia dan Singapura soal kepemilikan Pulau Batu Putih.
- Persaingan klaim oleh Malaysia dan Indonesia atas Pulau Sipadan, Sebatik, dan Ligitan serta perbatasan antara Sarawak dan Kalimantan di Pulau Kalimantan (Borneo).
- Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Thailand.
- Sengketa perbatasan antara Thailand dan Burma.

Data pada Tabel 1.1 di atas memperlihatkan masih terdapat sengketa perbatasan teritorial antarnegara di hampir sebagian besar kawasan Asia Tenggara. Hal ini berpotensi memunculkan konflik dengan eskalasi lebih besar, misalnya perang, yang akan mengarah kepada penggunaan atau pengerahan kekuatan militer yang dimiliki oleh masing-masing negara yang berseteru. Hal ini bisa saja terjadi di Asia Tenggara, sungguhpun pada masa pasca-Perang Dingin memang belum pernah terjadi perang militer berskala besar di kawasan ini. Atas dasar paparan di atas, penelitian ini hendak memfokuskan telaah pada dimensi kepentingan nasional Indonesia, sebagai sebuah negara-bangsa, dalam upaya memperkuat postur militer/pertahanan guna menjaga kedaulatan wilayah/teritorialnya. Peneliti lebih menyoroti persoalan bagaimana Indonesia merespon dinamika kawasan atau ancaman lingkungan strategis, terutama dalam merespon pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara pada rentang waktu 1998-2010. Pemilihan interval waktu ini didasarkan pada pemikiran bahwa adalah penting untuk mengetahui respon Indonesia dalam periode satu dekade terakhir di tengah perubahan regional Asia Tenggara yang sifatnya strategis dan dinamis. Pemahaman mutakhir yang diperoleh memungkinkan penulis untuk dapat menganalisis secara akademik dan kemudian memahami kebijakan di sektor penguatan postur pertahanan Indonesia. Rentang waktu selama 2004-2009, menurut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, adalah masa di mana pelanggaran kedaulatan menjadi isu yang sangat mengemuka.

Dari kesepuluh negara di Asia Tenggara, beberapa negara berada pada posisi teratas dari segi kekuatan dan kemampuan (postur) militer. Negara-negara tersebut antara lain Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Di tengah pembangunan kekuatan dan kemampuan militer sejumlah negara di Asia Tenggara ini dan dalam kaitan dengan dinamika/ancaman lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara, terlebih krisis ekonomi yang juga pernah terjadi pada 1998, apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia serta bagaimana keberhasilan postur pertahanan yang dibangun oleh Indonesia untuk

mampu mengimbangi perkembangan/pembangunan kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara selama periode 1998-2010 menarik untuk diteliti.

KERANGKA ANALITIK

Mengutip William Tow, di dalam studi hubungan internasional realisme “*attempts to deal with human nature as it is and not as it ought to be, and with historical events as they occurred, not as they should have occurred.*” Artinya, realisme berupaya untuk menjelaskan sifat dasar manusia itu dengan ‘sebagaimana adanya,’ bukan ‘sebagaimana yang seyogyanya atau sebagaimana yang seharusnya.’ Dalam konteks pemikiran realis, Tow menjelaskan bahwa tiap negara-bangsa, di dalam struktur internasional yang anarkis, senantiasa mengejar kepentingan nasional melalui penguatan *power* (kekuatan) yang dimilikinya. Praktis, upaya untuk meraih kepentingan politik ini berada di atas dimensi sosial dan ekonomi.

Merujuk pemikiran Tow di atas, setiap negara akan selalu bersikap rasional dan senantiasa berupaya mengejar kepentingan nasional. Salah satu di antara upaya ini adalah dengan merumuskan postur kekuatan strategis yang dimiliki.⁴⁸ Sebagai pijakan analisis terhadap perumusan postur kekuatan strategis tersebut, di dalam tesis ini penulis menggunakan teori *deterrence*, *defense*, *arms race*, dan *security dilemma* yang dikemukakan oleh seorang pemikir realis terkemuka dan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dari London School of Economics and Political Science, Barry Buzan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian minimal terdiri atas jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik dalam artikel jurnal ini, peneliti menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Peneliti menggunakan studi kasus dengan pertimbangan bahwa desain ini memungkinkan peneliti untuk lebih fokus di dalam menganalisis suatu interval atau periode kebijakan. Selain itu, desain studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk lebih spesifik dalam menghimpun dan kemudian menganalisis data serta melakukan generalisasi ataupun kesimpulan secara terbatas.

Data untuk artikel ini utamanya mencakup (1) upaya pembangunan postur militer negara-negara di Asia Tenggara 1998-2010, (2) postur militer mutakhir negara-negara di Asia Tenggara, dan (3) kebijakan umum serta upaya atau langkah politik pemerintah Indonesia dalam membangun postur militer. Di samping melalui pelbagai literatur, jurnal, majalah, dan dokumen negara, data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber. Termasuk di antaranya adalah Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan Republik Indonesia 1999-2000 dan 2004-2009), Edy Prasetyono dan Andi Widjajanto (pengamat hubungan internasional dan militer/pertahanan di Universitas Indonesia), Jaleswari Pramodhawardani dan Ikrar Nusa Bhakti (pengamat militer/pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI) serta Yahya Muhaimin

(Guru Besar Hubungan Internasional dan pengamat militer/pertahanan Universitas Gadjah Mada). Semua data sekunder terkait dengan postur militer Indonesia 1998-2010 serta hasil wawancara mendalam ini akan dianalisis sebagai bagian dari *text and document analysis*.

PEMBAHASAN

Pembangunan Kekuatan Militer di Kawasan Asia Tenggara

Belanja pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, menurut NIDS (*National Institute for Defense Studies*), tampaknya mengalami peningkatan sejak awal tahun 1990-an. Akan tetapi, krisis ekonomi yang melanda kawasan ini pada tahun 1997 sangat memukul bidang pertahanan di hampir semua negara, terutama faktor jatuhnya nilai dolar AS dalam belanja pertahanan. Implikasinya, terjadi pemotongan besar-besaran dari segi jumlah biaya pembelian peralatan tempur dan latihan militer. Besaran defense spending dan defense build-up masing-masing negara ASEAN pada tahun 1999 terlihat bervariasi, tergantung pada seberapa besar badai krisis menghantam ekonomi domestik masing-masing.

Dalam tahun fiskal 1999, menurut NIDS, belanja pertahanan Malaysia naik kira-kira 9,4% dari anggaran nasional. Ini menunjukkan kenaikan dari angka 7,2% pada tahun fiskal 1998 ketika pengeluaran mengalami penurunan, baik dari segi jumlah maupun rasio anggaran nasional. Sebelum krisis, ditutup pada level 10%. Namun demikian, usulan anggaran untuk tahun fiskal 2000, yang diumumkan pada bulan Oktober 1999, menunjukkan penurunan dalam anggaran, yaitu menjadi 7,9%. Tanda kenaikan persentase dalam belanja pertahanan justru terjadi pada tahun fiskal 1999 yang mungkin disebabkan oleh ditundanya pengadaan peralatan dan pembayaran yang awalnya direncanakan untuk tahun fiskal 1998. Berhadapan dengan masa-masa sulit dalam pemulihan ekonomi ini akhirnya mendorong Malaysia untuk memprioritaskan pengembangan industri domestiknya.

Sementara itu, dalam catatan NIDS, ekonomi domestik Singapura tampaknya cukup tangguh dari gejolak krisis 1997. Bahkan dalam masa sebelum krisis, sekitar seperempat dari total anggaran nasionalnya dialokasikan untuk belanja pertahanan. Dalam kaca mata Singapura, perekonomian domestik dan kesejahteraan tumbuh pesat bila ada jaminan keamanan negara yang pasti. Karenanya, Singapura memandang alokasi yang begitu besar bagi sektor pertahanan adalah suatu investasi jangka panjang. Kendati pemerintah Singapura telah menetapkan belanja pertahanan sekitar 6% dari PDB-nya, anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 1999 adalah sebesar 4,6%.

Tidak jauh berbeda dengan Singapura, sebagaimana dipaparkan NIDS, belanja pertahanan Filipina setahun pasca-krisis 1997 juga mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun persentase terhadap pengeluaran nasional. Namun, sebagian besar biaya

untuk pengadaan peralatan untuk militer Filipina telah, atau seharusnya, dibayar dari AFP *Modernization Act Trust Fund* yang terpisah dari pertahanan anggaran sejak tahun 1995 di bawah Program Modernisasi AFP. Program lima belas tahun dengan dana total sebesar 332 miliar peso ini terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) restrukturisasi kekuatan; (2) akuisisi dan upgrade persenjataan; (3) pangkalan/pengembangan sistem pendukung; (4) pengembangan sumber daya manusia, dan (5) pengembangan doktrin.

Thailand terlihat hampir sama dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara dalam menghadapi beban pemulihan pasca-risis ekonomi 1997. Bahkan, bisa dikatakan, sebagaimana dicatat oleh NIDS, Thailand adalah negara yang paling menderita karena pemotongan belanja pertahanannya. Persentase anggaran pertahanan dari total anggaran mengalami penurunan dari 11% (sebelum krisis) menjadi sekitar 9,3% pada tahun fiskal 1999. Praktis, terjadi pemotongan yang begitu tajam dalam hal pengeluaran-pengeluaran untuk pengadaan peralatan militer. Pemotongan yang sangat besar pada April 1999 ini juga berdampak pada terhentinya operasional sejumlah peralatan militer Thailand karena penundaan pembelian suku cadang. Buktinya, terjadi penundaan terhadap pemesanan *main battle tank* jenis Leopard Mk 1 yang akan digunakan untuk dua batalion. Selain itu, perbaikan terhadap 50 unit tank ringan jenis *Scorpion* juga belum dilakukan. Kapal induk HTMS *Chakrinaruebet* juga tidak bisa beroperasi karena terkendala penggantian komponen. Masih banyak peralatan lain yang berhenti beroperasi karena ketiadaan suku cadang. Implikasi pemotongan anggaran pertahanan juga terjadi dalam hal jumlah personel. Upaya efisiensi ini terlihat dari rencana pengurangan personel militer darat dari 236.000 menjadi 190.000 menjelang tahun 2007. Pengurangan yang sama di periode ini juga terjadi pada personel militer udara, yakni dari 53.000 personel menjadi 45.000.

Hingga tahun 2004, kondisi ekonomi domestik sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara terlihat masih belum pulih. Merujuk pada reviu yang dilakukan oleh NIDS pada tahun 2004, negara-negara ASEAN masih memikul beban pemulihan pasca-krisis ekonomi 1997. Defisit anggaran secara keseluruhan hampir terjadi di tiap negara, kecuali Singapura yang tampaknya tidak begitu merasakan himpitan yang signifikan mengingat ekonomi domestiknya cukup mapan. Defisit anggaran secara keseluruhan ini terlihat mulai meningkat sejak tahun 2000. Kondisi ini, di rata-rata negara ASEAN, diperparah oleh beban biaya pengelolaan keamanan dan ketertiban publik dalam negeri untuk mengatasi konflik antaretnik, gerakan separatis, gerakan 'Islam radikal', dan kelompok teroris.¹⁰ Filipina, misalnya, mengalami defisit anggaran yang kian tajam sejak tahun 2000 dan melonjak perlahan dari 147 milyar peso pada tahun 2001 ke angka 210,7 milyar peso pada tahun 2002. Konsekuensinya, modernisasi peralatan militernya mengalami kemandegan. Karenanya, bantuan militer dari AS sangat diandalkan oleh Filipina karena AS sendiri juga berkepentingan dalam perang melawan teroris. Pada saat yang sama, Filipina juga terbantu dari segi penumpasan gerakan separatis.

NIDS juga melaporkan bahwa, meskipun belanja pertahanan lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) mengalami peningkatan dari segi nominal mata uang lokal, tetapi nilai tukar rata-rata mata uang lokal mereka terhadap dolar AS tidak mengalami penguatan pasca-jatuh akibat krisis 1997. Implikasinya terasa sangat jelas bagi negara-negara ini. Sebagai contoh, parlemen Malaysia dan Filipina kerap menolak pelbagai program modernisasi senjata militer dan pasokan suku cadang dari luar negeri. Kendati demikian, sejumlah program modernisasi angkatan udara dan angkatan laut telah dilaksanakan. Akhirnya, pengadaan senjata murah buatan Rusia (yang ditukarkan dengan sejumlah komoditas di sektor pertanian) menjadi pilihan.

Pada tahun 2002, sebagaimana dicatat NIDS, sejumlah negara ASEAN mulai mengalami perbaikan ekonomi dan berupaya melakukan upgrade terhadap peralatan tempur mereka. Pulih dari krisis ekonomi tahun 1997, Malaysia untuk pertama kalinya memutuskan membeli tiga unit kapal selam dari Prancis, termasuk melakukan latihan militer. Selain itu, Malaysia juga berencana membeli pesawat tempur, helikopter, dan tank yang bakal diimplementasikan pada tahun 2003. Selanjutnya, pada bulan April 2002, Malaysia memutuskan untuk membeli 48 unit tank jenis PT- 91M senilai \$650 juta dari Polandia. Sebulan kemudian, Mei 2002, pembelian 18 unit pesawat tempur jenis Su-30MKM yang akan digunakan pada tahun 2006, dengan kontrak senilai lebih dari \$900 juta, juga merupakan bagian dari keputusan Malaysia untuk memperkuat postur pertahanannya. Dalam pembelian pesawat ini, Malaysia akan membayar 70% secara tunai dan 30% lainnya dengan ekspor minyak kelapa sawit. Upaya penambahan peralatan militer tidak sampai di situ karena Malaysia juga memutuskan untuk membeli tiga unit helikopter jenis Superlinx dari Inggris. Helikopter jenis ini cocok untuk meluncurkan rudal udara ke permukaan daratan. Penambahan juga akan dilakukan dalam peralatan udara, yaitu rencana pembelian 4 unit AWACS (Airborne Warning and Control System).

Walaupun masih berada dalam bayang-bayang beban krisis ekonomi tahun 1997, upaya penguatan postur pertahanan juga dilakukan oleh Thailand. Buktinya, Thailand berencana untuk memulai pembelian senjata pada tahun 2003. Kala itu, Perdana Menteri Thaksin Sinawatra berencana akan membenahi peralatan militer Thailand kendatipun pembenahan ekonomi domestik memang tetap menjadi prioritas. Pada bulan Juli 2002, pemerintah Thailand merancang sejumlah program pembelian senjata, baik program berjangka menengah maupun panjang.

Thailand mengupayakan sebuah sistem radar pertahanan udara dan sistem komunikasi yang akan menelan biaya sebesar 3 milyar baht dan akan dikerahkan di sekitar daerah yang berbatasan dengan Myanmar dan Kamboja. Melalui kerjasama dengan dana sebesar 4 milyar baht dengan imbal-dagang komoditas pertanian, Thailand memutuskan untuk membeli dua unit frigate dari Inggris. Berbarengan dengan rencana tersebut, pada masa ini juga dikaji suatu rencana pembelian 160 tank Pz-68/88 buatan Swiss sebagai pengganti tank M41-A3 buatan AS, dan empat unit helikopter Blackhawk

jenis UH-60 buatan AS. Sementara itu, karena alasan biaya yang masih menjadi kendala, rencana pembelian pesawat tempur Harrier untuk angkatan laut praktis mengalami penundaan. Hingga tahun 2004, Thailand memiliki sembilan unit pesawat tempur Harrier. Dari jumlah tersebut, hanya dua unit yang dapat dioperasikan mengingat krisis ekonomi untuk kepentingan pemeliharaan masih mengganjal.

Menariknya, negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia secara aktif membeli Sukhoi buatan Rusia sebagai bagian dari upaya penguatan postur pertahanan udara mereka. Menyikapi hal itu, Sukhoi berencana membangun sebuah service center di Malaysia untuk kepentingan promosi dan pelayanan perbaikan bagi negara-negara konsumen di Asia Tenggara.

Tahun 2004 tampaknya merupakan tahun ‘generasi baru’ bagi kekuatan militer Singapura. Dihadapkan dengan pelbagai tantangan keamanan antara lain upaya peace-keeping, kontra-terorisme, dan anti-penyebaran senjata pemusnah masal, Singapura terlihat begitu intensif melakukan modernisasi persenjataan untuk ketiga angkatan bersenjata. Menyadari betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi, upaya modernisasi ini berada di bawah suatu slogan ‘Developing the Third- generation Singapore Armed Forces’, di mana hampir semua komponen peralatan terintegrasi langsung dengan perangkat jejaring komputer.

Modernisasi peralatan ini, seperti dicatat NIDS, dapat terlihat dari dimulainya penggunaan Changi Naval Base pada 21 Mei 2004 oleh Angkatan Laut Singapura, suatu pangkalan yang ditopang oleh pelbagai fasilitas operasi yang dirancang cocok untuk frigate baru (tahun 2007) dan sejumlah perangkat lainnya. Singapura juga melakukan perjanjian dengan Prancis dalam pembelian enam frigate, termasuk aspek transfer teknologi. Berturut-turut, frigate pertama (kelas Lafayette; RSS Formidable) dibangun dan diluncurkan di Prancis pada 7 Januari 2004 dan tiba di Singapura pada Mei 2005 (termasuk enam frigate yang dijadwalkan bakal dioperasikan menjelang 2009). Menyusul frigate kedua, akan diluncurkan pada 3 Juli 2004, dibuat di Singapura dengan teknologi juga dari Singapura, tetapi lisensi diberikan oleh DCN, sebuah perusahaan pembuat kapal asal Prancis.

Upaya pengembangan dan penguatan postur pertahanan Singapura tidak berhenti sampai di sini. Bahkan, pada 16 Maret 2004, Kementerian Pertahanan Singapura mengumumkan bahwa pemerintah Singapura, sebagai bagian dari SCP (Security Cooperation Participant), telah memutuskan untuk ikut serta di dalam System Development and Demonstration Phase of the Joint Strike Fighter (JSF), suatu program yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sebagai bagian dari SCP, Singapura tampaknya sadar akan kesempatan emas yang dapat diraihnya, yakni rencana untuk memperkuat pertahanan udara dalam jangka panjang hingga tahun 2012.20 Peluang ini digunakan Singapura untuk rencana pembelian pesawat tempur generasi terbaru, utamanya tiga

pesawat: Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, dan Boeing F-15E Strike Eagle.²¹ Untuk tiap pesawat tempur, Singapura akan menghabiskan dana kira-kira sebesar \$55 juta dan rencana ini akan rampung di awal tahun 2005. Upaya pengembangan postur pertahanan ini kian kuat ketika Menteri Pertahanan Singapura mengunjungi AS dan mengatakan bahwa pada 10 Mei 2004 Singapura akan membeli dua puluh unit helikopter serbu jenis AH-64D Apache Longbow dari AS yang bakal dikerahkan dari Arizona ke Singapura menjelang tahun 2006.²² Alhasil, postur pertahanan Singapura semakin tangguh.

Pada tahun 2006, NIDS kembali melakukan reviu. Kali ini, kecenderungan peningkatan belanja pertahanan lima negara utama ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) masih terlihat. Untuk tahun fiskal 2004, misalnya, Singapura menganggarkan belanja pertahanan sebesar \$5 milyar, menyusul Malaysia \$4,3 milyar. Hal yang sama juga terjadi untuk Indonesia di mana ada peningkatan sebesar 55%, yakni dari \$3,2 milyar pada tahun 2003 ke \$3,6 milyar pada tahun 2004. Pasca-serangan teroris di AS pada 11 September 2001, NIDS melihat adanya trend peningkatan belanja pertahanan. Kecenderungan peningkatan belanja pertahanan ini dapat dilihat sebagai upaya penambahan dan pembelian peralatan militer untuk merespon serta mencegah serangan teroris (terkait dua serangan teroris di Bali) dan ekstremis di tingkat lokal (benturan antara militer dan ekstremis di Filipina dan di Thailand). NIDS juga melihat bahwa security dilemma, yang selama tahun 1990-an terjadi antara Singapura dan Malaysia dalam hal kompetisi pembelian peralatan militer, justru tidak begitu mengemuka pada masa ini. Singapura tampaknya lebih melihat ancaman dari dimensi eksternal seperti modernisasi militer yang dilakukan Cina, ketidakpastian hubungan Cina-Taiwan, dan penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.

Pada bulan Juli 2005, seperti yang dilaporkan NIDS, Thailand berencana membeli sejumlah senjata (rifles, machine guns, pesawat pengintai, dan lain lain) sebagai respon terhadap gangguan gerakan separatis yang ada di Provinsi Thailand Selatan. Tiga bulan kemudian, Oktober 2005, dengan dana sebesar 640 juta baht, Thailand juga berencana membeli sejumlah senjata api kecil, termasuk M-16 dari AS. Selain itu, militer Thailand juga mengumumkan bahwa ada keinginan untuk mengganti peralatan lama dengan yang baru. Ketika Menteri Pertahanan AS berkunjung ke Thailand pada Juni 2005, Thailand mendiskusikan rencana pembelian pesawat tempur F-16 dari AS. Upaya yang sama juga dilakukan dengan Rusia dalam rencana pembelian dua belas pesawat tempur Sukhoi jenis Su-30MK dengan dana sebesar \$500 juta. Pada masa ini, juga ada rencana pembelian pesawat tempur jenis F-18 dari AS dan JAS-39 dari Swedia. Berbarengan dengan Thailand, Malaysia juga tidak ketinggalan. Upaya penguatan postur pertahanan udaranya dapat dilihat dari pemesanan pesawat tempur Su-30MKMs. Sementara, kapal selam kelas Scorpion dan tanks PT-01 pun memperkuat pertahanan laut dan darat Malaysia. Rencana pembelian pesawat tempur jenis F/A-18F dan pesawat angkut jenis A-400M juga dilakukan dalam masa ini.

Di pihak lain, pada masa ini Singapura ternyata juga memperkokoh postur pertahanannya. Terbukti, sejalan dengan upaya Thailand dan Malaysia tadi, Singapura berencana untuk membeli delapan frigate kelas Formidable, dua di antaranya bakal dikerahkan dalam tahun 2005 dan sisanya pada tahun 2007, untuk mempertanggung pertahanan lautnya. Pada masa ini, Singapura tengah melakukan evaluasi untuk mengganti pesawat tempurnya dengan jenis Super Skyhawks A-4SU, termasuk rencana pembelian tiga tipe pesawat, yaitu the Eorfighter Typhoon, Dassault Aviation Rafale buatan Prancis, dan F-15 buatan Boeing. Realisasinya, pada tahun 2008 dan 2009 ditandatangani persetujuan pembelian 12 unit F-15SGs dengan Boeing. Di samping itu, Singapura juga gencar melakukan upaya transfer teknologi dari perusahaan pesawat AS guna mempecahngih teknologi perangkat persenjataan yang dimiliki.

Kecenderungan dalam peningkatan belanja pertahanan rata-rata lima negara utama di Asia Tenggara, terutama sejak tahun 2000, masih terlihat dalam reuiu yang dilakukan oleh NIDS pada tahun 2007. Lima negara yang paling besar dalam belanja pertahanannya dalam tahun fiskal 2005 ialah Singapura (\$5,57 milyar), Indonesia (\$2,53 milyar), Malaysia (\$2,47 milyar), Thailand (\$1,95 milyar), dan Filipina (\$840 juta). Singapura, walaupun telah berada di urutan teratas dalam kecenderungan tersebut, masih berambisi untuk kian menambah belanja militer dan memperkuat postur pertahanannya. Nyatanya, untuk tahun fiskal 2006, Singapura mengumumkan bahwa belanja pertahanannya sebesar \$6,13 milyar (naik 8,7% dari angka S\$9,2 milyar tahun sebelumnya). Dengan peningkatan yang sedemikian fantastis, Singapura telah membeli dan meluncurkan pelbagai peralatan militer, termasuk mereparasi tiga helikopter serang Apache Longbow jenis AH-64D yang kembali ke Singapura pada Januari 2006 dari AS. Sementara, pada 9 Mei 2006, Angkatan Laut Singapura meluncurkan RSS Supreme, dan frigate kelas Formidable generasi ketiga, dan dilengkapi dengan rencana penyebaran sebanyak enam frigate. Selanjutnya, pada 24 Mei 2006, Singapura pun mengumumkan bahwa pesawat jet tempur F-16D Block 52+ telah diluncurkan di 145 skuadron.

Belanja pertahanan Malaysia, menurut reuiu NIDS 2007, terlihat mengalami penurunan yang tajam. Hal ini tampak dari Ninth Malaysia Plan in 2006, sebuah rencana ekonomi jangka menengah untuk tahun 2006-2010, di mana Malaysia mengalokasikan \$4,29 milyar (7,2%) untuk bidang pertahanan. Padahal, Malaysia mengalokasikan 11% (\$45,08 milyar) dari anggaran nasionalnya pada rencana terdahulu. Menurut NIDS, hal ini bisa jadi merefleksikan kebijakan Perdana Menteri Abdullah Badawi yang mementingkan urusan sosial dalam negeri. Namun, penurunan tajam ini bukan berarti adanya degradasi dalam modernisasi militer Malaysia. Hal ini justru merupakan akibat dari nilai mata uang nasional Malaysia yang melemah karena kenaikan harga minyak. Pada masa ini, enam dari 18 Sukhoi Su-MKM dari Rusia tengah dipesan dengan total biaya \$900 juta dan akan tiba pada Desember 2007. Selain itu, pada bulan Juli 2006,

Malaysia juga berencana membeli dua frigate dan delapan pesawat tempur latih jenis Aermacchi.

Sementara itu, Thailand juga berupaya mengatasi keterbatasan biaya melalui rencana sepuluh tahun untuk membeli senjata dalam jangka waktu 2006-2014, yang terdiri dari perbaikan senjata yang rusak, pembelian senjata tambahan, dan modernisasi senjata militer. Dalam masa ini, Thailand juga tengah mempertimbangkan pembelian Sukhoi Su-30MK dari Rusia, Gripen dari Prancis, dan F-16C/D dari AS, termasuk rencana untuk meng-upgrade F-16s yang ada melalui barter dengan AS.

Pada Meret 2008, Malaysia menerima pesanan empat unit pesawat tempur Su-30MKM, sebagai tambahan atas enam unit yang telah dikirim pada 2007 yang secara keseluruhan merupakan bagian dari perjanjian pembelian 18 unit di tahun 2003.35 Singapura pun masih terus mengembangkan pembangunan pesawat tempur generasi ketiganya, terlebih ada sokongan anggaran yang sangat memadai. Karenanya, pada 22 Agustus 2008, Singapura menerima kiriman keenam frigate kelas Formidable dari Prancis. Di samping itu, Singapura juga berkepentingan untuk melakukan joint akuisisi terhadap pesawat tempur F-35 Lockheed Martin, hingga mencapai seratus pesawat dalam beberapa dekade mendatang.³⁶ Dengan kenaikan belanja pertahanan untuk tahun fiskal 2008 hingga mencapai 6%, pada bulan Mei 2008 Filipina memesan 18 unit pesawat latih Aermacchi. Pada Januari 2008, juga akan dilakukan akuisisi terhadap enam unit pesawat tempur Gripen. Di sini juga terlihat upaya Thailand dalam melakukan akuisisi persenjataan untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka. Sementara itu, pada September 2008, tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura, melakukan penandatanganan revisi Standard Operating

Reviu NIDS tahun 2010 melihat trends pembangunan senjata di Asia Tenggara sejak krisis ekonomi dunia 2008. Dari reviu tersebut juga tampak bahwa kawasan ini merupakan pasar bagi produsen senjata sekaligus area pembangunan/perakitan senjata militer. Namun, yang menarik dari reviu ini adalah implikasi yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi dunia 2008 terhadap upaya modernisasi persenjataan sejumlah negara. Malaysia, misalnya, karena pemotongan belanja pertahanan, akhirnya menunda rencana pembelian generasi kedua dari frigates dan juga program kendaraan lapis baja. Karena alokasi pemesanan kedua untuk enam unit pesawat tempur Gripen 39C/D tidak dimasukkan ke dalam anggaran tahun fiskal 2010, pembelian pun ditunda, termasuk pembelian F-5E/F. Akhirnya, pembelian enam unit Gripen 39C/D dijadwalkan dibeli pada tahun 2011. Namun demikian, menurut jadwal, pada Januari 2010, Malaysia akan menerima kiriman kapal selam KD Tun Razak. Di samping itu, Malaysia juga akan memperoleh 48 unit MBT (Main Battle Tanks) jenis PT-91M untuk memperkuat postur pertahanan daratnya. Bisa jadi hal ini adalah respon terhadap pembelian MBTs jenis Leopard 2A4 oleh Singapura. Sementara itu, Thailand, yang mengalami kesulitan pendanaan serupa dengan Malaysia, di tengah perkembangan pesat militer Cina, menurut

reviu NIDS 2011, terkait isu keamanan di Laut Cina Selatan, akan mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesiapsiagaan militer mereka. Kasus Vietnam, contohnya, yang aktif memperkuat postur militernya dengan melakukan program pembelian senjata dari Rusia. Pada bulan Desember 2009, Vietnam mengkonfirmasi pembelian enam unit kapal selam kelas Kilo dan delapan unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2. Bahkan, pada Februari 2010, Vietnam telah menandatangani perjanjian untuk penambahan pembelian sebanyak dua belas Sukhoi. Dua bulan kemudian, Mei 2010, Vietnam membeli enam unit pesawat patroli jenis DHC-6 yang dijadwalkan akan dikirim ke Angkatan Laut Vietnam antara tahun 2012 dan 2014. Vietnam juga memulai negosiasi dengan Israel dalam rencana pembelian sistem misil balistik berdaya- jangkauan pendek. Masih dalam kaitan respon terhadap isu keamanan di Laut Cina Selatan, spekulasi mungkin juga dapat dilakukan untuk kasus Malaysia yang pada bulan Januari 2009 membeli dua unit kapal selam kelas Scorpene. Secara eksplisit, Malaysia bahkan mengatakan ada kebutuhan untuk memastikan keamanan di Laut Cina Selatan.

Capaian Perkembangan Pertahanan Indonesia dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara

Kendati terbebani krisis ekonomi 1997, Indonesia terlihat masih berupaya memperkuat postur pertahanan lautnya, yaitu dengan melakukan program upgrade sistem radar pertahanan udara yang menurut rencana dilakukan di penghujung tahun 1999. Usulan pengadaan kapal selam buatan Korea Selatan juga menjadi bagian dari rencana sebelum krisis. Di samping itu, juga direncanakan pembelian enam unit domestic NC-212 MPAs dan tiga unit helikopter NBO-105 CB, yang semua pengadaannya dalam rencana ini akan terlaksana pada tahun 2000. Namun, krisis ekonomi memaksa pemerintah mengurungkan serangkaian rencana ini. Krisis ekonomi pada tahun 2008 yang melanda hampir semua negara di dunia juga dirasakan Indonesia. Harga minyak dunia yang mengalami kenaikan akhirnya memaksa pemerintah Indonesia melakukan pemangkasan anggaran di hampir semua bidang, termasuk di bidang pertahanan. Konsekuensinya, pemerintah Indonesia mengalami kerumitan yang cukup pelik dalam mengelola anggaran nasional. Selama periode 2004-2010, sebagai konsekuensi, Indonesia lebih memprioritaskan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat dibanding pertahanan negara.

Indonesia memiliki wilayah yang terluas dan jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara serta kaya akan sumber daya alam, tetapi tidak sanggup menghadirkan postur pertahanan yang dapat mengimbangi negara-negara lain di kawasan. Ini dapat terlihat manakala postur pertahanan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, terutama negara-negara kuat yang berdekatan seperti Singapura dan Malaysia. Namun demikian, secara umum, Indonesia terus berupaya melakukan langkah dan kebijakan untuk mengimbangi pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara. Sayangnya, kendala ekonomi tampak menjadi penyebab utama mengapa

Indonesia belum sanggup merespon dengan maksimal dan mengimbangi kekuatan militer negara-negara tetangga. Selama rentang waktu 1998-2010, Indonesia masih dibebani dengan persoalan kemiskinan di dalam negeri yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih banyak dari sektor pertahanan. Akan tetapi, usaha untuk mempersenjatai diri bagi Indonesia masih terus dilakukan melalui sejumlah kebijakan pengembangan postur pertahanan yang pada dasarnya terkait erat dengan dimensi doktrin pertahanan.

Misalnya, dalam pengadaan peralatan militer pada tahun 2002, menurut laporan NIDS, Indonesia terperosok ke dalam skandal pembelian senjata. Akibatnya, sejumlah rencana pengadaan peralatan dibatalkan, seperti pembelian empat unit helikopter jenis Mi-17 dari Rusia pada 2002 yang harus dibatalkan dua tahun kemudian karena ada skandal senjata. Hal yang sama juga terjadi di TNI-AL. Pada bulan Maret 2003, Indonesia memutuskan untuk membeli enam unit helikopter-angkut jenis Mi-2 dari Rusia. Menurut perjanjian, helikopter-helikopter itu akan dikirim pada September 2004. Namun, terjadi sedikit persoalan politik domestik dan hanya dua unit helikopter yang dikirim pada Mei 2004.5 Persoalan yang tidak jauh berbeda juga muncul dalam rencana pembelian dua unit korvet kelas Sigma dari Belanda. Angkatan Laut Indonesia tampaknya tidak secara jelas melibatkan Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan di dalam perjanjian tersebut. Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia pun mengkritik TNI-AL karena tidak ada koordinasi antarinstitusi. Konsekuensinya, pembelian ini tidak masuk ke dalam tahun fiskal 2004 dan akhirnya ditunda.

Di samping sejumlah pembatalan pembelian tersebut, di dalam upaya memperkuat kemandirian di sektor pertahanan militer dan mengembangkan industri pertahanan domestik, Indonesia lagi-lagi dihadapkan dengan pelbagai persoalan keterbatasan, antara lain masalah keterbatasan finansial, inovasi, dan sumber daya manusia untuk mengembangkan teknologi. Pelbagai perencanaan memang telah didesain dengan cukup baik dan berjangka panjang. Namun, sebagian besar dari rencana tersebut terbukti belum mampu dicapai. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia pernah berada pada masa di mana beberapa industri mandiri dalam negeri sudah mulai bergerak ke arah yang lebih maju, terutama pada awal 1990-an. Sayangnya, krisis ekonomi tahun 1998 sangat memukul sektor ini sehingga cukup sulit untuk mengembalikan keadaan untuk lepas dari kondisi kritis. Baru pada tahun 2004 ada upaya dan komitmen yang cukup terlihat, walaupun tidak sepenuhnya dapat terealisasi.

Untuk secara lebih sistematis menggambarkan ketidakberhasilan Indonesia dalam mengimbangi pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara-negara di Asia Tenggara dari segi kuantitas, pada bagian berikut akan diperlihatkan perbandingan postur militer antarnegara di kawasan tersebut. Paparan akan dimulai dengan perbandingan jumlah personel aktif negara-negara di Asia Tenggara dan kemudian dilanjutkan dengan perbandingan jumlah persenjataan masing-masing angkatan, yaitu Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selanjutnya, juga akan dipaparkan serangkaian kendala Indonesia dalam upaya mengimbangi pembangunan postur militer negara-negara kawasan, mulai dari kendala anggaran, kendala embargo, hingga kendala dalam riset dan pengembangan. Setelah itu, ada juga penjelasan tentang deterrent effect Indonesia terhadap negara lain yang berkaitan dengan aspek kualitas dan kuantitas persenjataan militer. Paparan akan ditutup dengan proyeksi singkat kekuatan Indonesia dalam konteks perimbangan kekuatan militer kawasan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun mendatang.

Widjajanto mengungkapkan pesimisnya bahwa hingga 2024 pun, melalui MEF, Indonesia masih belum memiliki kekuatan penangkal yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Hal itu dikarenakan proyeksi anggaran pertahanan sebesar 2% PDB belum tercapai hingga 2010 dan masih berada di bawah 1%. MEF sendiri pada dasarnya bertujuan untuk menutup gap antara jumlah ideal yang dimiliki dengan jumlah nyata yang ada sekarang ini. Terkait dengan kuantitas dan kualitas peralatan militer, Indonesia lebih menekankan pada varietas dan kesetaraan teknologi daripada jumlah. Dengan begitu, fokus yang hendak disasar Indonesia ialah bagaimana teknologi yang digunakan Indonesia memperlihatkan kesetaraan mutu senjata yang dimiliki. Sebagai contoh, bila Singapura memiliki F-15, Indonesia dapat mengimbangnya dengan Sukhoi-30. Selain itu, kendati jumlahnya sedikit, Indonesia juga melakukan kerja sama dan alih teknologi agar peralatan militer yang dimiliki agar tidak tertinggal dari negara-negara lain.

Dalam konteks perbandingan kondisi peralatan militer bidang laut, Purdijatno mencoba memberi gambaran lebih luas betapa jauh tertinggalnya penguatan postur pertahanan laut yang dimiliki Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Oleh karena itu, Indonesia harus mengimbangi pelbagai jenis kekuatan itu dengan kekuatan setara atau bahkan melebihi kemampuan negara-negara tersebut. Pandangan dan kritik Purdijatno terhadap pengembangan postur pertahanan laut Indonesia ini layak dicermati mengingat pengalamannya secara langsung sebagai Kepala Staf TNI-AL. Ia menjelaskan, Singapura yang bekerjasama dengan Prancis telah sanggup membangun kapal jenis fregat kelas La Fayette. Selain itu, Singapura juga mempunyai empat kapal selam baru buatan Swedia. Sementara, Malaysia yang bekerjasama dengan Jerman, telah bisa membangun kapal korvet kelas Meko. Pertahanan laut Malaysia juga ditunjang dengan dua kapal selam baru (dari enam yang direncanakan) jenis Scorpene dari Prancis. Di selatan Indonesia, kapal-kapal fregat dan kapal selam jenis Collins pun menopang pertahanan laut Australia.⁵⁵ Menyimak serangkaian data kekuatan yang dikemukakan Purdijatno ini, maka penting bagi Indonesia untuk berupaya mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara sekitar, terutama Singapura dan Malaysia.

Menurut pemerintah, untuk mengawal teritori Indonesia yang sedemikian luas, dibutuhkan 52 kapal perang jenis Korvet. Pada awal 2009, Indonesia membeli empat

Korvet dari Belanda, sebagai tambahan dari empat korvet yang telah dimiliki Indonesia sejak era 1980-an. Dengan begitu, pada 2009, Indonesia memiliki Korvet jenis SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach), yaitu KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Iskandar Muda, dan KRI Frans Kasiepo, yang berkemampuan jelajah patroli dalam segala jenis cuaca. Jenis ini adalah generasi baru dan hanya sedikit negara yang memilikinya. Bahkan, di kawasan Asia, baru Indonesia yang memiliki kapal jenis SIGMA ini.⁵⁶ Kendati demikian, dengan jumlah tersebut, masih terlihat belum cukup untuk mengawal perairan teritorial Indonesia yang begitu luas. Untuk mengawal wilayah perairan, postur TNI-AL hingga 2024 menyebutkan bahwa Indonesia harus memiliki dua belas kapal selam. Indonesia kini baru memiliki dua unit dengan kondisi rusak, yaitu KRI Cakra dan KRI Nanggala (buatan Jerman Barat 1977) yang mulai beroperasi tahun 1981. Keduanya difungsikan untuk siaga di armada timur Surabaya dan pada 2008 sempat diperbaiki. Di akhir 2008, Indonesia sempat berencana menambah kapal selam. Namun, rencana itu ditunda oleh pemerintah yang lebih memprioritaskan pengadaan kapal-kapal angkut jenis landing platform dock yang mampu menampung lima helikopter.

Selanjutnya, dalam konteks pengembangan postur pertahanan darat, Kiki Syahnakri, Kepala Staf TNI-AD November 2000-Mei 2002, berpendapat bahwa yang dibutuhkan ialah aspek kualitas dan bukan kuantitas karena jumlah yang banyak tanpa dibarengi dengan peningkatan mutu sangat berisiko.⁵⁸ Pandangan dalam penguatan pertahanan, dalam dimensi yang agak luas, juga dikemukakan oleh Chappy Hakim, Kepala Staf TNI-AU 2002- 2005. Sebagai mantan perwira tinggi di bidang pertahanan udara, Hakim justru menekankan betapa pentingnya orientasi kekuatan laut dan udara sebagai lapis pertama pertahanan Indonesia, dengan tidak mengabaikan pertahanan teritorial darat. Pandangan ini didasarkan Hakim kepada pertimbangan strategis bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sedemikian luas. Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas lagi, pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: apakah ketidakberimbangan kuantitas persenjataan di Asia Tenggara memang membahayakan Indonesia? Pandangan yang cukup menarik dikemukakan oleh Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia 2004-2009. Pembelian senjata-senjata baru di Asia Tenggara, baik dalam masa Perang Dingin maupun dalam masa sesudahnya, menurut Sudarsono, tidak serta-merta membahayakan Indonesia. Hal ini karena dalam merespon pembelian peralatan militer tertentu oleh negara tetangga, apakah yang bersifat ofensif ataupun agresif (termasuk radar), Indonesia tetap menjaga tingkat kecanggihan atau varietas teknologi yang dimiliki. Sebagai contoh, jika negara-negara lain memiliki radar jenis 'x', maka Indonesia juga harus mempunyai radar jenis 'x'. Bila jenis striker negara-negara lain adalah F-16, maka Indonesia juga harus memiliki F-16. Menurutnya, walaupun Indonesia tidak mampu membeli dalam jumlah banyak, tetapi Indonesia harus memiliki peralatan tersebut serta harus setara dengan Singapura dan Malaysia.

Pesawat jenis F-16 Fighting Falcon memang dianggap oleh masyarakat dunia sebagai pesawat tempur kelas satu mengingat sistem persenjataan yang dimilikinya sangat meyakinkan dan sanggup mengangkut beragam senjata, antara lain peluru kendali/rudal, termasuk rudal anti-radiasi. Dikaitkan dengan konteks Indonesia, jika pesawat ini diberi tangki bahan bakar tambahan, ia akan sanggup terbang dengan jarak tempuh 3.890 km yang setara dengan jarak Jakarta-Jayapura atau Bangkok-Dili. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa F-16 ini bukan satu-satunya pesawat tempur kelas satu produksi AS. Selain F-16, AS juga menghasilkan sejumlah pesawat tempur lain yang memiliki kekuatan sepadan, misalnya F-15 Eagle dan F/A-18 Hornet (keduanya buatan McDonnell Douglas), serta F-22 dan F-14 Tomcat buatan Grumman.

Dalam konteks ini, kesetaraan teknologi sebagaimana dinyatakan oleh Sudarsono penting agar negara-negara tetangga tidak memandang Indonesia dengan sebelah mata, kendati Indonesia memang tertinggal dari segi kuantitas. Hal ini berlaku misalnya dalam jenis peralatan seperti kapal selam, pesawat tempur, dan helikopter serbu. Padahal, sedemikian luasnya wilayah teritorial Indonesia tentu menuntut adanya jumlah peralatan militer yang sesuai. Alhasil, terdapat dua masalah yang senantiasa mengemuka dalam upaya penguatan postur pertahanan keamanan Indonesia, yaitu kesetaraan teknologi dan anggaran. Fakta empiris menunjukkan, luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia memang paling luas dan paling besar dari sembilan negara di Asia Tenggara lainnya. Hal ini memunculkan konsekuensi logis berupa pemenuhan kesiapsiagaan militer yang tangguh, baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas. Dalam kaitan dengan jumlah persenjataan dan kepentingan menjaga kedaulatan, pengamanan bersama Selat Malaka yang melibatkan tiga negara berdekatan, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia, adalah penting karena sekitar 30% perdagangan laut dan lalu lintas kapal-kapal dunia melewati selat ini. Lebih jauh lagi, masih dalam pandangan Sudarsono, tidak ada negara yang berdaulat mutlak, termasuk tidak berdaulat mutlak dalam teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan kerja sama dengan Singapura dan Malaysia agar kepentingan Indonesia dapat terjaga melalui kepentingan kedua negara ini untuk tidak mengancam Indonesia.

Di Selat Malaka, sesungguhnya terjadi tumpang-tindih perbatasan ketiga negara ini dan tidak mungkin diselesaikan dengan cara keras atau perang. Karenanya, harus ada pengakuan bahwa kedaulatan Indonesia sedikit dilanggar oleh Singapura dan Malaysia, dan kedaulatan dua negara ini pun sedikit dilanggar oleh Indonesia mengingat teknologi telah melewati batas-batas laut teritorial. Dengan begitu, di sini terjadi simetri di dalam kesetaraan relatif agar masing-masing negara tetap merasa berdaulat. Pada intinya, Selat Malaka harus dikelola secara bersama agar kepentingan ketiga negara dapat berada di satu titik temu. Persoalan terbesar Indonesia dalam 1998-2010 ialah besarnya biaya yang diperlukan untuk memelihara peralatan militer yang telah tua.⁶⁵ Anggaran yang terbatas berdampak signifikan terhadap kondisi rata-rata peralatan tempur pada ketiga matra TNI.

Hal ini secara keseluruhan cukup membahayakan postur militer Indonesia. Tabel 4.7 memperlihatkan, alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat (75%) lebih siap bila dibandingkan dengan kesiapan alutsista TNI Angkatan Laut yang hanya 57%. Kondisi yang paling membahayakan adalah kesiapan alutsista TNI Angkatan Udara yang cuma 45%. Hal ini akan berdampak kepada menurunnya deterrent effect terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Singapura dan Malaysia yang sangat berdekatan dari segi geografis. Terlebih lagi, tensi hubungan Indonesia dengan kedua negara ini dari waktu ke waktu terlihat fluktuatif, termasuk faktor sengketa wilayah kedaulatan.

Menganalisis perbandingan jumlah kekuatan militer antarnegara di kawasan Asia Tenggara selama kurun waktu 1998-2010, terlihat bahwa hampir di semua segi postur – baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara – Indonesia relatif jauh tertinggal. Dari aspek jumlah militer aktif di Asia Tenggara, Indonesia hampir sama dengan Thailand dan bahkan keduanya berada di bawah Vietnam. Vietnam pun masih unggul dari segi jumlah peralatan (ACV) Angkatan Darat yang kemudian disusul oleh Singapura. Di matra laut, Singapura terlihat mengungguli, terutama jumlah kapal selam. Untuk Angkatan Udara, lagi-lagi Indonesia berada di bawah rata-rata kekuatan negara ASEAN. Indonesia yang mengembangkan kebijakan MEF bahkan belum sanggup mencapai pagu anggaran wajar, yaitu 2,0% dari PDB. Rata-rata anggaran pertahanan Indonesia selama kurun waktu 1998- 2010 masih berada di bawah 1% PDB. Hal ini sangat berisiko karena, bila dipandang dari perspektif realisme, negara-negara yang melakukan pembangunan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara dianggap berpotensi sebagai aggressor yang mengancam kedaulatan Indonesia. Walaupun upaya deterrence yang dilakukan oleh Indonesia ini – antara lain dengan memperkuat postur (kekuatan dan kemampuan) militer pada ketiga angkatannya, yaitu darat, laut, dan udara – telah dilakukan, tetapi karena tidak intensif dalam melakukan respon, keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam menganalisis perkembangan lingkungan strategis kawasan, maka Indonesia tidak mampu mengimbangi pembangunan postur pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga belum mencapai titik ‘strategic stability’. Dengan tidak mencapai posisi ‘strategic stability’ ini, ada kemungkinan salah satu di antara negara-negara lain di kawasan lebih dulu menyerang Indonesia manakala terjadi gesekan atau eskalasi konflik yang mengarah pada perang di wilayah kedaulatan yang masih disengketakan.

Kemungkinan *strategic stability* ini akan bisa dicapai apabila Indonesia mampu merealisasikan rencana jangka panjang (selama 20 tahun) di bidang pertahanannya yang akan dimulai pada tahun 2010. Misalnya, disebutkan di dalam kebijakan pemerintah Indonesia bahwa pada Rencana Tahap I (2010-2014) akan berupaya mencapai alokasi anggaran yang berkisar 1,8% hingga 2,1% PDB, Rencana Tahap II (2015-2019) akan berupaya mencapai alokasi anggaran yang berkisar 2,2% sampai dengan 2,61% PDB.67

Bila dapat direalisasikan secara konsisten dan berjangka-panjang, hal ini tentu akan berdampak cukup signifikan terhadap penguatan postur pertahanan pada ketiga angkatan militer yang dimiliki oleh Indonesia dan juga perimbangan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan pengembangan postur pertahanan Indonesia selama kurun waktu 1998-2010, melalui analisis dokumen dan wawancara terhadap sejumlah pihak, terlihat upaya beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Singapura, Malaysia, dan Thailand, cukup intensif dalam memperkuat postur pertahanan masing-masing. Dalam masa itu, Singapura merupakan satu-satunya negara yang sangat agresif dalam memperkokoh kekuatan dan kemampuan armada militernya, baik di matra darat, laut, maupun udara.

Ada titik-titik penting di mana Indonesia terlihat berupaya memperkokoh postur pertahanannya, yaitu di tahun 2003, 2007, dan 2008. Namun, sejak tahun 1998, saat di mana krisis ekonomi terjadi di Asia Tenggara dan reformasi domestik juga berlangsung, dapat dikatakan Indonesia tidak melakukan respon terhadap kondisi perkembangan lingkungan strategis di Asia Tenggara. Masa ini lebih dititik-beratkan pada upaya meletakkan fondasi kesisteman dan kelembagaan yang bersifat jangka panjang agar Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran serta pengadaan alutsista, termasuk melakukan perumusan undang-undang di bidang pertahanan dan TNI. Upaya pengembangan postur militer baru tampak pada tahun 2003 ketika Indonesia melakukan kontrak pembelian persenjataan udara dengan Rusia, yaitu pembelian pesawat Sukhoi, dan merencanakan pengadaan empat unit kapal selam. Tahun-tahun 2007 dan 2008 adalah masa penting bagi perkembangan arah kebijakan pertahanan Indonesia karena dalam periode ini pemerintah mengeluarkan sejumlah dokumen yang cukup lengkap dalam mengelola kebijakan pertahanan, yaitu kebijakan umum pertahanan negara, postur pertahanan, strategi pertahanan, dan doktrin pertahanan.

Selama kurun waktu 1998-2010, pelbagai industri strategis domestik yang dimiliki oleh Indonesia tampaknya belum secara penuh mendukung kebutuhan alutsista bagi ketiga angkatan. Salah satu industri strategis yang cukup memperlihatkan produktivitas yang berarti adalah PT Pindad yang memang secara khusus menghasilkan produk bagi alutsista angkatan darat. Itu pun masih dalam sebagian peralatan yang berteknologi rendah dan menengah. Sementara, industri strategis yang menghasilkan persenjataan guna mendukung postur angkatan laut, yakni PT PAL, masih jauh dari harapan. Hal yang sama juga terjadi di PT DI (Dirgantara Indonesia) yang belum memberikan sumbangan signifikan bagi postur pertahanan udara. Aspek dana, pelembagaan riset dan pengembangan, serta SDM yang mendukung produktivitas merupakan kendala yang sangat mendasar. Oleh karena itu, bila yang menjadi sasaran dalam jangka panjang adalah kemandirian industri strategis untuk mendukung sektor pertahanan, maka Indonesia harus secara cepat mengatasi kendala-kendala tersebut. Menurut penulis, hal yang paling penting dibenahi adalah aspek SDM dalam arti bahwa

Indonesia harus semakin memperbanyak lulusan di bidang teknik perkapalan dan pesawat terbang yang berkualitas global, tentunya dengan tidak mengabaikan upaya pengembangan SDM yang mendukung teknologi militer. Hal ini secara perlahan juga dapat mengatasi ketergantungan Indonesia pada teknologi luar negeri mengingat Indonesia hanya baru mampu mengembangkan teknologi pada tingkat rendah dan menengah.

Dilema keamanan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara hanya berada pada tingkat kompetisi persenjataan konvensional, belum pada level perlombaan senjata yang sengit. Bila membandingkan aspek kuantitas persenjataan yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara, baik oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara masing-masing, Indonesia secara umum masih tertinggal. Inheren di dalam hal tersebut, sejumlah kendala seperti anggaran yang minim (rata-rata masih di bawah 1% PDB), pelembagaan dan pendanaan riset & pengembangan yang belum sempurna, serta ganjalan embargo persenjataan dari Amerika Serikat yang pernah terjadi hingga tahun 2005 merupakan serangkaian hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Jika anggaran yang menjadi kendala utama dalam pengembangan postur pertahanan Indonesia, maka upaya ke arah peningkatan PDB menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan usaha melipatgandakan besaran PDB, persentase besaran anggaran pertahanan diharapkan juga dapat ditingkatkan hingga menuju tingkat wajar dan ideal dari kerangka kebijakan MEF (Minimum Essential Force) yang dianut oleh Indonesia. Tanpa lompatan yang berarti ke arah itu, Indonesia akan jauh tertinggal di kawasan Asia Tenggara mengingat pembangunan postur militer sebuah negara membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Dengan demikian, penulis berargumen bahwa kebijakan pembangunan postur pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam merespon pembangunan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 1998-2010 lebih dimaksudkan untuk mencapai kekuatan deterrent daripada membangun kekuatan ofensif. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat adanya persepsi bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sementara, kemampuan Indonesia untuk membangun kekuatan militer di atas tingkat deterrent sangat terbatas. Keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam menganalisis perkembangan lingkungan strategis kawasan menyebabkan kebijakan tersebut tidak mencapai tingkat deterrent dan juga belum sampai pada titik 'strategic stability'.

Kalau yang menjadi ukuran perbandingan adalah jumlah persenjataan militer, Indonesia bahkan belum mencapai apa yang disebut sebagai strategic stability di kawasan Asia Tenggara. Kemungkinan terburuk atau risiko yang akan dipikul oleh Indonesia adalah potensi agresi dari negara lain yang semakin membesar karena merasa memiliki postur militer yang lebih kredibel daripada Indonesia. Menurut penulis, kondisi di Asia Tenggara yang baru sampai pada tingkat kompetisi persenjataan ini akan mengarah ke dilema keamanan yang keras, yaitu perlombaan senjata, manakala Indonesia, sebagai negara yang terbesar dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk di Asia Tenggara, melakukan upaya penguatan postur pertahanannya dengan kualitas dan kuantitas yang signifikan. Namun demikian, dalam konteks yang lebih makro, penguatan postur pertahanan Indonesia ini bukan tanpa konsekuensi. Hal ini justru akan berimplikasi

kepada respon negara-negara lain yang juga akan merasa terancam. Upaya Indonesia akan memunculkan rasa takut dan ancaman bagi negara-negara lain, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali merespon dengan melakukan penguatan postur pertahanan. Konsekuensinya, dilema keamanan di Asia Tenggara akan meningkat tajam. Bisa jadi, status quo yang ada sekarang (hingga tahun 2010) dipandang sebagai suatu *strategic stability* karena terbukti belum pernah terjadi perang di tingkat kawasan ataupun eskalasi ketegangan yang mengarah ke kondisi hubungan yang lebih buruk. Atau, mungkin saja, bila ada lompatan besar Indonesia dalam melakukan penguatan postur di suatu masa tertentu akan menyulut rasa tidak aman bagi negara-negara lain dan mengarah kepada perlombaan senjata yang lebih intens.

Lebih spesifik, bila dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang, paling tidak hingga tahun 2024, Indonesia secara bertahap memperkuat postur pertahanan sembari meningkatkan besaran PDB-nya, hal ini juga bukan tanpa masalah dalam konteks perimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Penulis menengarai, spiral aksi-reaksi justru akan terjadi dengan lebih serius lagi karena melibatkan Indonesia yang hampir sepuluh tahun belakangan tidak begitu gencar mengembangkan kemampuan dan kekuatan militernya. Dengan kata lain, melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan dibarengi dengan peningkatan besaran PDB, kemudian alokasi untuk anggaran pertahanan bagi pembelian alutsista juga meningkat, ini diprediksi dapat mengarah kepada dilema keamanan di kawasan. Perkiraan ini didasarkan pada perhitungan dalam konteks politik internasional karena Indonesia adalah negara dengan posisi strategis secara geografis dan demografis yang dapat mengancam eksistensi negara-negara kunci seperti Singapura dan Malaysia. Memang, di satu sisi, dalam hal kuantitas persenjataan, apa yang disebut sebagai *strategic stability* dapat tercapai. Namun, di sisi lain, kompetisi persenjataan di masa depan juga menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kondisi kompetisi menuju perimbangan yang tidak kunjung usai ini niscaya dapat ditangani melalui CBMs (*Confidence Building Measures*) dengan arti bahwa masing-masing negara secara sadar menyepakati aspek kualitas dan kuantitas persenjataan yang dimiliki, antara lain dengan tukar-menukar data rencana pembangunan pertahanan. Hal ini penting mengingat pertahanan-keamanan di Asia Tenggara cukup riskan bila tidak dikelola dengan melibatkan semua negara di kawasan ini.

Di bagian Kesimpulan ini, ada isu kontroversial yang penulis anggap penting untuk dikemukakan. Ketika tesis ini ditulis, pemerintah Indonesia berencana untuk membeli sebanyak seratus MBT (*Main Battle Tank*) bekas jenis Leopard dari Belanda dengan anggaran mencapai \$280 juta. Pemerintah tampaknya tidak memperoleh dukungan dari DPR karena ketidakjelasan alasan dan kegunaan peralatan tersebut. Penulis berargumen, dengan anggaran yang cukup fantastis itu, Indonesia lebih relevan untuk membeli pesawat tempur atau kapal perang yang baru. Walaupun dengan jumlah yang tidak begitu banyak, tetapi jika kualitasnya mumpuni, maka secara umum dipandang cukup mempertanggung postur pertahanan dan daya tangkal Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, sebagai negara kepulauan yang terluas di kawasan Asia Tenggara, lapis pertama pertahanan Indonesia adalah laut dan udara, dengan tidak mengabaikan pertahanan daratnya.

Sebagai penutup, tesis ini belum lengkap karena tidak menelisik dan mengaitkan analisis dengan dimensi doktrin pertahanan yang dianut oleh Indonesia, yakni doktrin

sishankamrata (atau sishanta) secara lebih mendalam. Padahal, postur pertahanan yang dibangun oleh Indonesia idealnya diturunkan dari dimensi doktrin dan juga dihubungkan dengan aspek strategi, utamanya dalam konteks pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karenanya, dibutuhkan kajian yang lebih mutakhir dan komprehensif dalam menelaah keterkaitan antara postur dan doktrin ini. Selain itu, sejalan dengan upaya Indonesia menuju kemandirian industri pertahanan, kajian yang menyoroti perkembangan pelbagai industri pertahanan yang ada di Indonesia juga menarik dilakukan mengingat Indonesia baru mencapai pengembangan pada level teknologi menengah dan rendah, belum pada pengembangan inovasi yang lebih berjangka panjang. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah persoalan dalam perbandingan pelbagai jenis peralatan tempur di Asia Tenggara. Penulis belum menjangkau pemikiran dan membangun argumen bahwa senjata tertentu atau ragam senjata yang hampir setara memang dibutuhkan oleh suatu negara, khususnya Indonesia, atas dasar geostrategi, geopolitik, dan taktis- strategisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

- Adams, K.R., 'Attack and Conquer? International Anarchy and the Offense-Defense-Deterrence Balance', *International Security*, Winter 2003/04, vol. 28, no. 3, p. 53.
- Herz, J.H., 'Idealist Internationalism and Security Dilemma', *World Politics*, vol. 2, no. 2, 1950, pp. 157-158.
- Kurniawan, Y., 'Modernisasi Kekuatan Militer Singapura (1998-2008): Motif dan Respon Strategis', *Equilibrium*, vol. 1, no. 2, April 2010, pp. 30-54.

Buku dan Edited Volume:

- Abubakar, M., *Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan. Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Acharya, A., *Singapore's Foreign Policy: The Search for Regional Order*, World Scientific Publishing and Institute of Policy Studies, Singapore, 2008.
- Anggoro, K., 'Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Indonesia', dalam B. Bandoro (ed.), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, CSIS, Jakarta, 2005.
- , 'Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin', dalam J. Sudarsono dkk., *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, p. 84.
- Bakrie, C.R., *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Burnham, P., Gilland, K., Grant, W., dan Layton-Henry, Z., *Research Methods in Politics*, Palgrave Macmillan, New York, 2004.

- Buzan, B., *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, MacMillan Press, London, 1987.
- Chrisnandi, Y., *Reformasi TNI. Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 2005.
- Collins, A., *The Security Dilemmas of Southeast Asia*, MacMillan Press, London, 2000.
- Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, *Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 1997*, Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- , *Program Lima Tahun Pertahanan Keamanan Negara V. 1994-1998*, Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, tidak ada tahun.
- , *Strategi dan Postur Pertahanan Keamanan Negara dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua Tahun 1994-2018 (Revisi TA. 1997/1998)*, Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, 1998.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Departemen Pertahanan Republik Indonesia*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- , *Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
- , *Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan. Strategic Defence Review Tahun 2004*, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Jakarta, 2004, tidak diterbitkan.
- , *Politik dan Strategi Pertahanan Negara Tahun 2000-2004*, Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2001, tidak dipublikasikan.
- , *Postur Pertahanan Negara*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2007.
- , *Rencana Strategis Pembangunan Bidang Pertahanan Negara Tahun 2000-2004 (Revisi I)*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Department of Defense of the United States of America, *Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms*, Joint Chiefs of Staff, USA, 2006.
- Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, *Direktorat Analisa Lingkungan Strategis*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Fukuyama, F., *The End of History and The Last Man*, The Free Press, New York, 1992.
- Ganesan, N., *Realism and Interdependence in Singapore's Foreign Policy*, Routledge, New York, 2005.
- Gray, C.S., *War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History*, Routledge, New York, 2007.

- Hakim, C., *Dari Segara ke Angkasa. Sebuah Otobiografi*, Jakarta, Gramedia, 2005.
- , *Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan*, Red & White Publishing, Jakarta, 2011.
- Haramain, A.M., *Gus Dur Militer dan Politik*, LKiS, Yogyakarta, 2004.
- Haseman, J., *The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power*, RAND, Santa Monica, 2002.
- Herz, J.H., *International Politics in the Atomic Age*, Columbia University Press, New York, 1959.
- Huxley, T., 'Singapore Strategic Outlook and Defense Policy', dalam J.C. Liow dan R. Emmers (eds.), *Order and Security in Southeast Asia: Essays in Memory of Michael Leifer*, Routledge, New York, 2006, pp. 141-160.
- Ihza, Y., *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2009.
- IISS, *The Military Balance 2010*, the International Institute for Strategic Studies, London, 2010.
- Jenie, U.A., 'Lampiran 1: Surat Ketua LIPI' dalam M.A. Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008, pp. 250-251.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Kinerja Kementerian Pertahanan Tahun 2010*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, *Ketahanan Negara Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar*, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, 2005.
- Leifer, M., *Singapore's Foreign Policy: Coping with Vulnerability*, Routledge, New York, 2000.
- Liow, J.C., *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*, Routledge Curzon, New York, 2005.
- Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa*, Mabes ABRI, Jakarta, 1998.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Pertahanan Negara RI Abad ke-21*, Mabes TNI-AD, tidak diterbitkan, Jakarta, 2008.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Revisi Postur Tentara Nasional Indonesia Tahun 2000-2014*, Markas Besar TNI, Jakarta, 2004.
- Morgenthau, H.J., *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, 6th edn, edisi Bahasa Indonesia Politik Antarbangsa, diterjemahkan oleh S.Maimoen,

- A.M. Fatwan, dan Cecep Sudrajat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Muhaimin, Y.A, Bambu Runcing & Mesiu. Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, Jakarta, Tiara Wacana, 2008.
- NIDS, East Asian Strategic Review 2000, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2000.
- , East Asian Strategic Review 2004, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2004.
- , East Asian Strategic Review 2005, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2005.
- , East Asian Strategic Review 2006, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2006.
- , East Asian Strategic Review 2007, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2007.
- , East Asian Strategic Review 2009, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2009.
- , East Asian Strategic Review 2010, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2010.
- , East Asian Strategic Review 2011, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2011.
- Prihatono, T.H., Evangeline, J., dan Gindarsah, I., Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pemiaraan Politik dan Kebijakan, Propatria Institute, Jakarta, 2007.
- Purdijatno, E., Mengawal Perbatasan Negara Maritim, Grasindo, Jakarta, 2010. Santosa, T., dkk., Komisi I: Senjata-Satelit-Diplomasi, Suara Harapan Bangsa, Jakarta, 2009.
- Singh, B., The Vulnerability of Small States Revisited, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Snow, D.M., National Security for A New Era: Globalization and Geopolitics, Pearson, New York, 2007.
- Sudarsono, J., Berbagai Persoalan Pertahanan Negara, Biro Hubungan Masyarakat Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

- Sutarto, E., *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*, Pusat Penerangan TNI, Jakarta, 2005.
- Syahnakri, K., *Aku Hanya Tentara: Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Tan, A., *Force Modernisation Trends in Southeast Asia*, IDSS, Singapore, 2004. Tang, S., *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*, Palgrave Macmillan, New York, 2010.
- Tongzon, J.L., *The Economies of Southeast Asia. Before and After the Crisis*, 2nd edn, Edward Elgard Publishing, Massachusetts, 2002.
- Tow, W.T., *Asia-Pacific Strategic Relations: Seeking Convergent Security*, Cambridge University Press, New York, 2001.
- Viotti, P.R., dan Kauppi, M.V., *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, 3rd edn, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007.
- Weatherbee, D.E., *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, 2nd edn, Rowman & Littlefield, New York, 2009.
- Widjajanto, A., 'Reformasi Militer, Ekonomi Pertahanan, dan Bisnis Militer di Indonesia' dalam J. Pramodhawardani dan A. Widjajanto (Eds.), *Bisnis Serdadu: Ekonomi Bayangan*, The Indonesian Institute, Jakarta, 2007, pp. 1- 26.
- Widjajanto, A., 'Sambutan', dalam Bakrie, C.R., *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, p. xxix.
- Yin, R.K., *Case Study Research. Design and Methods*, 3rd edn, Sage Publications, London, 2003.
- Yudhoyono, S.B., 'Amanat Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari TNI ke-60' dalam *Pertahanan, Keamanan, dan Perdamaian. Kumpulan Pidato dan Wawancara Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono*, Dharmapena, Jakarta, 2005, p. 17.
- Zuhal, *Knowledge & Innovation. Platform Kekuatan Daya Saing*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Artikel Online:

- Antaraneews.com (online), *Korvet Sigma TNI AL Buatan Belanda Tiba di Indonesia*, <<http://www.antaraneews.com/print/75637/maluku-religious-leaders-urge-people-not-be-provoked>>, diakses 16 November 2011.
- ASEAN, Member Countries (online), <<http://www.asean.org/4736.htm>>; <<http://www.asean.org/4738.htm>>; <<http://www.asean.org/4739.htm>>;

- <<http://www.asean.org/4741.htm>>; <<http://www.asean.org/4743.htm>>;
<<http://www.asean.org/4745.htm>>; <<http://www.asean.org/4746.htm>>;
<<http://www.asean.org/4748.htm>>; <<http://www.asean.org/4749.htm>>; dan
<<http://www.asean.org/4750.htm>>, diakses 28 Desember 2011.
- _____, Overview (online), <http://www.asean.org/about_ASEAN.html>, diakses 10 Oktober 2011.
- Cordersman, A.H., dan Kleiber, M., 'The Asian Conventional Military Balance in 2006: Overview of major Asian Powers', CSIS (online), 26 Juni 2006, <http://csis.org/files/media/csis/pubs/060626_asia_balance_powers.pdf>, diakses 15 Oktober 2011.
- _____, Burke, A.A., dan Hammond, R., 'The Military Balance in Asia: 1990-2010 - A Quantitative Analysis', CSIS, Washington, D.C, September 2010, pp. 67-92, <<http://csis.org/publication/military-balance-asia-1990-2010>>, diakses 9 Maret 2011.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara(online), <<http://www.dephan.go.id/uu3/index.html>>, diakses 9 Maret 2011.
- KBR68H (online), Litbang Kemenhan, Otak Dibalik Pertahanan Negara!, <<http://www.kbr68h.com/perbincangan/diskusi-lepas/11908-litbang-kemenhan-otak-dibalik-pertahanan-negara>>, diakses 17 Januari 2011.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008 (online), 2008, <http://www2.kemhan.go.id/buku_putih/bukuputih.pdf>, diakses 23 April 2011.
- Maiwanews.com, TNI-AD Kini Punya 5 Helikopter Serbu Mi 35P Buatan Rusia (online), <<http://www.maiwanews.com/berita/tni-ad-kini-punya-5-helikopter-serbu-mi-35p-buatan-rusia/>>, diakses 1 Januari 2011.
- Ministry of Defense of Singapore, Five Power Defense Arrangements: A Singapore Perspective (online), <http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1998/Vol24_2/3.htm>, diakses 29 Oktober 2011.
- NIDS, the Role of the National Institute for Defense Studies (online), <http://www.nids.go.jp/english/about_us/index.html>, diakses 29 Oktober 2011.
- Portal Nasional Republik Indonesia, Peta Sumber Daya Alam (online),

<<http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam.html>>, diakses 27 Desember 2011.

Prasetyono, E., 'Talking Points. Postur Pertahanan: Kekuatan Pokok Minimum (MEF, Minimum Essential Force)?', Propatria Institute,

<<http://www.propatria.or.id/loaddown/index.php?induk=90>>, diakses 21 Maret 2011.

SIPRI, The SIPRI Military Expenditure Database (online),

<<http://milexdata.sipri.org/result.php4>>, diakses 15 Oktober 2011.

The Habibie Center, Presentasi Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie berjudul Pengembangan & Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan, disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR-RI, 31 Januari 2011,

<<http://www.habibiecenter.or.id/download/Presentasi%20BJH%20di%20Sidang%20Komisi%20I%20DPR-RI.pdf>>, diakses 15 Februari 2011.

Yustinigrum, R.E.E., Enam Dekade Dinamika Persahabatan Indonesia-Rusia, LIPI, Jakarta, 2011, <[http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-](http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia-)

[enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia-](http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia-)>, diakses 21 September 2011.

Artikel Surat Kabar:

'35 Triliun Anggaran Pertahanan 2009', Media Indonesia, 17 September 2008, p. 2. 'Impor Senjata Militer akan Dikurangi', Republika, 15 Mei 2001.

'Indonesia Siap Produksi Rudal,' Indo Pos, 24 Februari 2009, p. 1. 'Indonesia Sudah Bisa Bikin Rudal', Rakyat Merdeka, 24 Februari 2009, p. 1.

'Kapal Patroli TNI AL Akan Dilengkapi Rudal Rusia', Suara Karya, 6 Oktober 2009, p. 4.

'Panser Buatan Sendiri, Hemat Rp 1,5 Triliun', Indo Pos, 11 Juli 2009.

'Pengadaan Kapal Selam Baru Ditunda Setahun', Jurnal Nasional, 6 Oktober 2009, p. 6.

'RI Fokuskan Kesetaraan Teknologi Pertahanan', Suara Karya, 17 September 2008, p. 4.

'Rp 2,1 Triliun untuk Industri Pertahanan Dalam Negeri', Republika, 11 Januari 2008, p. 3.

'TNI AU Kurangi Bom dari Luar Negeri', Suara Pembaruan, 19 Mei 2001.

'Tunda Kapal Selam, Prioritaskan Kapal Angkut', Indo Pos, 2 September 2008, p.3.

Artikel Majalah:

- Bakrie, C.R., 'Membangun Kekuatan Sistem Pertahanan dan Postur TNI', Prisma, vol. 29, Januari 2010, p. 41.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2009, vol. 20, no. 6, Maret-April 2009.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 17, no. 5, Januari-Februari 2006.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2009, vol. 22, no. 3, November-Desember 2009.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 19, no. 6, Maret-April 2008.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 18, No. 4, November-Desember 2006.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008, vol. 19, no. 5, Januari-Februari 2008.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 21, no. 5, Januari-Februari 2009.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 21, no. 5, Januari-Februari 2010.
- , WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007, vol. 18, no. 5, Januari-Februari 2007.
- , WIRA. Media Informasi Kementerian Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2009, vol. 25, no. 9, September-Oktober 2010.
- Mada, D.P., 'Bukan Hanya F-16 Pesawat Tempur Kelas Satu', Warta Departemen Hankam, no. 76, tahun X, April-Mei 1999, pp. 4-5.
- Sjamsoeddin, S., 'Pemenuhan Kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force)', dalam Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Warta Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Edisi Khusus 2005, pp. 7-10.
- Swardjo, 'Kerjasama Militer RI-Rusia: Suatu Era Baru' dalam Departemen Pertahanan Republik Indonesia, WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 21, no. 5, Januari-Februari 2009, pp. 18-20.
- Suyoso, U., 'Mengenal Kebijakan dan Strategi Departemen Pertahanan Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2002
Pertahanan Negara', Warta Departemen Pertahanan Republik Indonesia, no. 98, tahun XIV, November-Desember 2002, p.8.
- Widjajanto, A., 'Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, 1945-1998', Prisma, vol. 29, no. 1, Januari 2010, pp. 3-20.

Tesis:

Heryaman, O., *Postur Militer Negara-Negara Asia Tenggara: Dinamika Persenjataan dan Pergeseran Lingkungan Strategis Internasional dari Era ke Pasca Perang Dingin*, tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2001.

Komeni, Y., *Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Tenggara dan Stagnasi Pertahanan Indonesia Periode 2001-2004*, tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP-Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Prajuli, W.A., *Pilihan Kebijakan Akuisisi Persenjataan Indonesia tahun 1998-2004 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis Asia Tenggara*, tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP- Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Sihotang, K.J., *Peningkatan Kekuatan TNI-AD sebagai Komponen Utama Pertahanan Negara dalam Merespon Ancaman (Studi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua)*, tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Wawancara:

Wawancara dengan A. Widjajanto, Depok, 27 Mei 2011. Wawancara dengan E. Prasetyono, Depok, 19 Mei 2011. Wawancara dengan I.N. Bhakti, Jakarta, 24 Mei 2011.

Wawancara dengan J. Pramodhawardani, Jakarta, 12 Mei 2011. Wawancara dengan J. Sudarsono, Jakarta, 12 Mei 2011.

Wawancara dengan Y.A. Muhaimin, Jakarta, 19 Mei 2011.

Undang-Undang:

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Fokus Media, Jakarta, 2004.

Lain-lain:

‘Pembangunan Industri Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Sarana Pertahanan’, Jakarta, 26 Januari 2005, naskah dikirimkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia, tidak diterbitkan, pp.6-7.

Pokok-Pokok Paparan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, disampaikan pada Kuliah Umum Menteri Pertahanan RI ‘Mengembangkan Pertahanan Nir- Militer Indonesia’ di FISIP-Universitas Indonesia, Depok, 19 September 2005.